

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan merupakan sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pemerintah bangsa Indonesia terbagi atas dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengurus semua urusan pemerintahan. Pemerintah pusat adalah penguasa yang bertugas di pusat yang membawahi seluruh pemerintah daerah. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara pemerintahan bangsa Indonesia, yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu para Menteri. Sementara pemerintah daerah adalah penguasa yang memerintah pemerintahan di daerah lewat otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan peluang dan sekaligus juga sebagai tantangan. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada Daerah untuk berkreasi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki dan dinikmati sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain otonomi juga sebagai tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah menunjukkan bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri (Rusmana *et al.* 2011). Pemerintah dan DPR sepakat untuk

mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada saat implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru. Kedua UU tentang otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 (Julastiana dan Suartana, 2013).

Menurut Zhouhaier (2011) adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah akan menciptakan iklim yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Pemberian otonomi daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang akan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri. Pemberian otonomi daerah juga dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan cara mengelola sumber daya yang ada dan membentuk hubungan kemitraan dengan masyarakat. Tujuan membentuk hubungan kemitraan dengan masyarakat yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Uhunmwuango dan Aibieyi (2013) pembangunan suatu daerah seharusnya memang berasal dari dalam. Pembangunan tersebut datang melalui kehendak dan keinginan orang-orang di daerah. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Kenyataannya pemerintah daerah umumnya belum dapat menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah (Halim dan Damayanti, 2007:23). Akudugu (2012) mengatakan bahwa setiap pemerintah daerah diharapkan agar mampu untuk lebih memajukan pembangunan sosial ekonomi bagi penduduk setempat.

Pembangunan daerah berarti memampukan daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki guna memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tuntutan kemandirian ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mencakup, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi saat ini masih didominasi oleh bantuan pemerintah pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Salah satu perbedaan mendasar terkait pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan penuh yang dimiliki daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Kondisi ini didasari asumsi bahwa pemerintah daerah adalah institusi yang paling mengerti atau memahami kondisi daerahnya sendiri. Menurut Warner (2012) adanya perdebatan saat ini, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan desentralisasi fiskal, karena kemampuan daerah tidak merata di setiap daerah. Pada tahun 2004 otonomi daerah mulai diberlakukan. Konsekuensi menjalankan otonomi daerah yaitu masing-masing daerah dituntut untuk berupaya dalam meningkatkan sumber PAD agar nantinya mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Rinaldi, 2012).

Demi pelaksanaan otonomi daerah, Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan berbagai upaya-upaya di dalam meningkatkan perolehan PAD. Peningkatan perolehan ini disebabkan karena faktor dana merupakan penentu dalam mengetahui lancar tidaknya suatu pemerintahan. Bila kemampuan dalam pendanaan suatu pemerintahan terbatas maka akan mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat ikut terhambat. Tidak banyak yang dapat dilakukan jika dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat ada keterbatasan sumber PAD dimana akan menyebabkan pelayanan tidak dapat diberikan secara optimal.

Kendala yang biasa dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tingkat kesiapan keuangan yang berbeda pada setiap daerah. Kebijakan otonomi daerah adalah kebijakan yang menguntungkan daerah-daerah yang mempunyai sumber daya potensial. Namun bagi daerah yang kurang memiliki sumber daya potensial, kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang tidak menguntungkan (Norregaard,2013).

Era otonomi pemerintah dituntut untuk mandiri dalam melaksanakan fungsi dan memberlakukan pembiayaan seluruh kegiatan daerah. Potensi-potensi daerah yang tersedia diharapkan mampu dimaksimalkan dengan baik agar pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya PAD. PAD akan diperoleh dari sumber-sumber pendapatan pajak daerah yang dikelola ataupun yang berpotensi untuk dipungut pajak daerah yang dapat dioptimalkan dengan baik. Sumber-sumber pendapatan tersebut nanti dapat dipergunakan secara efektif dan efisien (Arsana, 2013).

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menggambarkan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam operasionalisasinya, kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari struktur APBD-nya.

Anggaran Pemerintah Daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga merupakan instrumen fiskal pemerintah daerah

dalam mengendalikan perekonomian wilayahnya. Instrumen fiskal pemerintah daerah dapat melakukan stimulus terhadap perekonomian di wilayahnya guna memicu perkembangan perekonomian wilayahnya. Kemampuan keuangan dari suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab (Rinaldi, 2012). Pengelolaan keuangan daerah tertentu dapat tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan peraturan untuk pembangunan pemerintahan daerah (Lucky, 2013).

Analisis Tipologi Klassen merupakan teknik pengelolaan suatu sumber dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sumber tertentu terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah (Mahmudi, 2010). Dengan menggunakan Analisis Tipologi Klassen, suatu sumber dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori berikut:

1. Sumber Unggulan (Prima) adalah sumber yang paling dominan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Suatu sumber dikategorikan ke dalam sumber Prima apabila sumber tersebut Pertumbuhannya tinggi dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah besar.
2. Sumber Potensi adalah sumber yang juga memberikan kontribusi tinggi bagi Pendapatan Asli Daerah tetapi pertumbuhan sumber tersebut lambat dan cenderung menurun.

3. Sumber Berkembang adalah sumber yang sedang mengalami peningkatan yang di indikasikan dengan pertumbuhan tinggi tetapi kontribusinya masih rendah.
4. Sumber terbelakang adalah sumber yang menjadi kelemahan daerah yang di indikasikan dengan pertumbuhan lambat dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah rendah.

Ferdinand, (2014:43) mengartikan *Research Gap* atau kesenjangan penelitian sebagai celah-celah penelitian yang dapat dimasuki oleh seorang peneliti terdahulu. Sebuah penelitian ilmiah dapat juga berangkat dari adanya masalah yang ditemukan dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, yang kemudian disebut sebagai *research gap*.

Radho (2014) meneliti tentang sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang dikategorikan sebagai sumber unggulan, potensial, berkembang dan terbelakang dalam pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah bagi pemerintah Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak daerah terdiri dari lima jenis yang sangat berpotensi dan tiga jenis pajak berpotensi sedangkan Retribusi daerah terdiri delapan jenis retribusi berpotensi dan enam belas jenis retribusi kurang berpotensi.

Penelitian Ratuhalin (2015) mengenai Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Kupang Tahun 2010-2013, digunakan 4 (empat) analisis berikut :

1. Analisis efektivitas menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki kriteria sangat efektif karena ditunjang oleh realisasi beberapa jenis maupun komponen pajak daerah yang cukup tinggi, namun masih terdapat realisasi beberapa jenis maupun komponen pajak yang masih rendah, sedangkan penerimaan retribusi daerah berfluktuasi karena realisasi beberapa jenis maupun komponen retribusi daerah pada tahun 2010-2011 cukup tinggi dengan kriteria efektivitas cukup efektif tetapi di tahun 2012-2013 tidak mencapai target .

2. Analisis pertumbuhan menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki trend pertumbuhan positif setiap tahunnya, namun jenis-jenis maupun komponen-komponen pajak daerah dan retribusi daerah masih memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah dengan trend pertumbuhan negatif.
3. Analisis kontribusi menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah umumnya $< 50\%$, yang berarti kurang baik.
4. Trend pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki trend pertumbuhan positif dan berfluktuasi, demikian juga dengan pertumbuhan pendapatan per kapita masyarakat.

Mone (2015) dalam penelitiannya berjudul Analisis Potensi Retribusi Daerah Kabupaten Rote Ndao mengungkapkan bahwa hasil pemetaan potensi pendapatan Asli Daerah khusus retribusi daerah dengan rata-rata kontribusi pendapatan retribusi daerah dan pertumbuhan per sumber pendapatan retribusi daerah dapat dikategorikan dalam sumber-sumber sumber unggul (Prima), berkembang, Potensial, dan terbelakang. Penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Rote Ndao mengalami perkembangan yang positif (berpotensi) sehingga perlu ditingkatkan penentuan target; capaian realisasi penerimaan retribusi daerah menunjukkan trend yang berfluktuasi dimana jenis-jenis retribusi daerah yang diharapkan menjadi penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Loe (2015) mengungkapkan bahwa perkembangan pajak daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2010-2013 berfluktuasi, dan secara umum dilihat dari empat sumber yang ada yakni sumber unggulan (Prima) sumber potensial, sumber berkembang dan sumber terbelakang. Sumber-sumber pajak daerah yang tergolong dalam sumber Unggulan yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame. Tahun 2010 pajak penerangan jalan. Tahun 2011 dan tahun 2012, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian C.

Pada tahun 2013 yang termasuk unggul adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan, singkatnya penerimaan pajak daerah sangat berpotensi (Unggul).

PAD merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya. Upaya pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menggali sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada Table 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2015-2019

Jenis-Jenis PAD		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD Yang Sah	TOTAL PAD
2015	Target	658,726,117,000	38,278,885,000	71,575,348,634	103,966,395,166	872,546,745,800
	Realisasi	662,667,383,501	32,888,198,526	71,557,011,784	115,202,646,567	882,315,240,378
	%	100.60%	85.92%	99.97%	110.81%	101.12%
2016	Target	729,670,235,500	45,769,704,000	77,639,882,000	150,332,834,500	1,003,412,656,000
	Realisasi	745,481,335,512	40,418,137,792	77,139,883,317	132,146,764,331	995,186,120,952
	%	102.17%	88.31%	99.36%	87.90%	99.18%
2017	Target	781,961,319,888	27,095,652,000	67,597,247,696	150,275,349,493	1,026,929,569,077
	Realisasi	814,122,727,711	24,266,495,631	67,209,561,753	141,892,781,932	1,047,491,567,027
	%	104.11%	89.56%	99.43%	94.42%	102.00%
2018	Target	827,886,747,000	27,495,019,000	73,465,455,000	161,602,864,602	1,090,450,085,602
	Realisasi	866,157,779,773	27,570,244,733	72,415,455,930	129,126,498,141	1,095,269,978,577
	%	104.62%	100.27%	98.57%	79.90%	100.44%
2019	Target	955,215,837,016	69,986,994,000	82,227,926,500	238,410,951,632	1,345,841,709,148
	Realisasi	908,207,117,663	60,831,986,435	70,662,452,308	219,257,396,882	1,258,958,953,288
	%	95.08%	86.92%	85.93%	91.97%	93.54%

Sumber : Laporan Keuangan Pemprov NTT, diolah Penulis

Sumber-sumber dari PAD terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa hasil pajak daerah memberikan sumbangan tertinggi kepada PAD di

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kemudian diikuti oleh lain-lain PAD yang sah sebagai penyumbang PAD kedua terbesar, lalu diikuti oleh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penyumbang terendah dalam PAD yaitu retribusi.

Pada tahun 2015-2019 PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu mengalami peningkatan. Tahun 2015 PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 662.667.383.501 sampai 5 tahun berikutnya mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 908.207.117.663. Meningkatnya PAD disebabkan adanya komponen pajak daerah yang memberikan sumbangan tertinggi pada PAD Provinsi NTT.

Provinsi NTT memiliki sumber pendapatan daerah yang cukup banyak yang berasal dari dana pajak daerah yang fungsinya agar dapat lebih meningkatkan sistem dan mekanisme pembangunan daerah otonom. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga harus dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber penerimaan PAD. Pajak daerah memiliki peran yang penting dalam membiayai pembangunan daerah karena pajak daerah yang memberikan sumbangan tertinggi kepada PAD. Tanpa adanya pajak daerah kebutuhan akan dana yang diperlukan untuk pembangunan daerah akan sulit terpenuhi. Permasalahan mengenai pajak daerah harus dapat ditangani secara tepat agar pajak daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Salah satu sumber dana yang sangat penting bagi pembiayaan pembangunan di suatu daerah yaitu penerimaan pajak daerah. Pentingnya sumber dana tersebut diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaannya yaitu melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutannya. Kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak dan kemampuan aparat dalam melaksanakan tugasnya di lapangan menjadi faktor keberhasilan dalam pemungutan pajak (Halim, 2004).

Upaya untuk peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Salah satu cara tersebut adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan. Cara meningkatkan efektivitas pemungutan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya (Halim, 2010:153).

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD yaitu dengan intensifikasi. Salah satu intensifikasinya adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya dimungkinkan untuk dipungut pajak. Sarana dan prasarana wilayah serta kualitas pembangunan yang berorientasi pada pemerataan perlu ditingkatkan. Peningkatan tersebut dilakukan agar sumber dana dan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.

Penerimaan PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum merata di setiap daerahnya. Penerimaan pendapatan hanya terpusat pada satu wilayah tertentu seperti daerah Kota Kupang yang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum mengoptimalkan penerimaan di daerah lain, yang juga memiliki pariwisata yang perlu dikembangkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus dapat mengoptimalkan penerimaan PAD karena NTT memiliki potensi penerimaan daerah yang beragam. Analisis potensi-potensi yang tersedia di daerah dan pengembangannya perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PAD yang berguna sebagai pemasukan daerah.

Kemampuan dalam menggali potensi sumber penerimaan daerah harus diikuti dengan kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya yang dimiliki. Selain itu, diperlukan juga kemampuan menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya.

Kemampuan yang dimiliki akan memperbesar penerimaan dan menciptakan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi.

Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah diatas memperlihatkan bahwa total penerimaan cukup besar dari tahun ke tahun dan laju pertumbuhan yang terus meningkat. Selama kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami trend yang terus meningkat walaupun pada tahun 2019 realisasinya tidak mencapai target PAD.

Peningkatan pendapatan Asli Daerah yang berkaitan dengan potensi sumber-sumber PAD harus dikelola dengan baik guna memberikan kontribusi dalam menunjang pemasukan keuangan daerah, pemanfaatan sumber-sumber PAD yang ada dan berpotensi dikembangkan di daerah diharapkan mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga dapat dipergunakan secara efisien untuk memperbaiki sarana dan prasarana daerah dan membuka sumber penerimaan baru, sehingga akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul :
Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi NTT dari tahun 2015-2019 ?

2. Bagaimana Potensi PAD yang bersumber dari Pajak Daerah di Provinsi NTT berdasarkan Tipologi Klassen ?
3. Bagaimana Potensi PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah di Provinsi NTT berdasarkan Tipologi Klassen ?
4. Bagaimana Potensi PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Provinsi NTT berdasarkan Tipologi Klassen ?
5. Bagaimana Potensi PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Provinsi NTT berdasarkan Tipologi Klassen ?
6. Strategi apa yang ditempuh untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi NTT dari tahun 2015-2019
2. Untuk mengetahui potensi PAD yang bersumber dari Pajak Daerah di Provinsi NTT berdasarkan Tipologi Klassen
3. Untuk mengetahui potensi PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah di Provinsi NTT berdasarkan Tipologi Klassen
4. Untuk mengetahui potensi PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Provinsi NTT berdasarkan Tipologi Klassen
5. Untuk mengetahui potensi PAD yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah di Provinsi NTT berdasarkan Tipologi Klassen

6. Untuk mengetahui strategi yang ditempuh untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.4 Manfaat Penelitian

- Manfaat Praktis dalam Penelitian adalah sebagai berikut :
 1. Merupakan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menganalisa potensi Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat lebih optimal dan maksimal.
 2. Sebagai informasi ilmiah berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Manfaat Teoritis dalam Penelitian adalah sebagai berikut :
 1. Sebagai wahana untuk memahami teori tentang Pendapatan Asli daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur
 2. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tentang konsep Pendapatan Asli Daerah pada waktu yang akan datang.